



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI RABU, 13 FEBRUARI 2013



DAFTAR ISI

Proyek Monorail Jakarta	1
Jalan Tol	2
Infrastruktur Gas	3
Pengembangan Pembangkit Listrik	4
Proyek Bendungan	5
Interkoneksi Listrik Jawa-Sumatera	6
Monorel	7



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des																			

2013

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat |
| <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Kontan |
| <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Neraca | <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input checked="" type="checkbox"/> Indopos |
| <input type="checkbox"/> Lain-lain, | | | |

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proyek Monorel Jakarta	- Dengan masuknya Ortus Holdings sebagai Investor dalam Jakarta Monorail, hal itu akan menggeser Grup Hadji Kalla sebagai Investor awal - Monorail ditargetkan mulai beroperasi tahun depan - Mode transportasi di Jakarta tidak akan tumpang tindih		2014			

► PROYEK MONOREL JAKARTA

Soeryadjaya Geser Kalla

JAKARTA—Ortus Group, perusahaan milik pengusaha Edward Soeryadjaya, menggantikan Grup Hadji Kalla sebagai investor dalam pembangunan monorel Jakarta.

(12/2).

"Untuk pendanaannya kami peroleh dari dana internal," jelasnya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan proyek monorel ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun ini sehingga awal tahun depan sudah ada kereta yang beroperasi di atas rel yang dibangun.

TUNGGU DOKUMEN

Menurutnya, keputusan pelaksanaan proyek monorel tinggal menunggu satu dokumen dari PT Jakarta Monorel selaku pelaksana proyek monorel.

"Realisasi proyek ini tinggal menunggu dokumen. Kalau dokumen yang kami minta tersebut dikasih hari ini, bisa saya putuskan hari ini berangkat dan langsung cor," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, persoalan menyangkut mundurnya Adhi Karya akan diselesaikan hingga minggu depan terkait pembayaran jatuh tempo kepada perusahaan itu.

Sukmawati menambahkan PT Jakarta Monorel siap menebus utang monorel milik PT Adhi Karya

Tbk di Kuningan, Jakarta senilai Rp120 miliar.

"Sekarang sedang dilakukan negosiasi akhir. Jika kami sudah bayar, maka itu milik kami. Ini sedang diaudit kembali kami ada perhitungan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan] kita tunggu angkanya," imbuhnya.

Untuk tarif tiket monorel, dia memperkirakan sekitar Rp9.000-Rp12.000 untuk 30 km, dengan asumsi jumlah penumpang rata-rata 250.000 orang per hari.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjun mengatakan moda transportasi di sejumlah kota di Indonesia khususnya Jakarta tidak akan tumpang tindih seiring mulai bermunculan rencana moda berbasis rel terbaru seperti mass rapid transit dan monorel, melengkapi kereta rel listrik (KRL) yang sudah ada.

"Kami akan atur agar rute ketiganya tidak tumpang tindih, sehingga tidak saling membunuh dan bahkan bisa efisien mengatasi kemacetan,"

► Ortus Holdings Ltd pegang saham 90% PT Jakarta Monorail.

► Monorel ditargetkan mulai beroperasi tahun depan.

► Moda transportasi di Jakarta tidak akan tumpang tindih.

katanya.

Dia menjelaskan memang KRL yang sudah ada saat ini akan dikembangkan dengan penambahan armada sehingga akan lebih efektif mengangkut penumpang dari kota-kota penyangga Jakarta.

Manager Humas PT KCI Eva Chairunisa menjelaskan program pengadaan armada akan dilakukan setiap tahun hingga akhir 2019. **B**

Emanuel Teme Hayen/Berliana Elisabeth S.
redaksi@bisnis.co.id

Direktur Utama PT Jakarta Monorel Sukmawati Syukur mengatakan pembangunan monorel tersebut memiliki landasan hukum pengaktifan kembali pengerjaan proyek itu.

Saat ini, katanya, investasi terbesar pada Jakarta Monorail berasal dari perusahaan asal Singapura, Ortus Holdings Ltd, dengan besaran investasi mencapai 90%.

Perusahaan itu, lanjutnya, sudah sejak awal berkomitmen untuk bergabung. Salah satu bentuk komitmennya adalah membiayai pembayaran utang dengan Adhi Karya sebesar US\$30 juta. "Investasi 90% dibiayai oleh Ortus sedangkan 10% dari Jakarta Monorail sendiri," ujarnya Selasa (12/2).

Pemda DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan monorel yang terhenti sejak 2007 ini sebagai bagian dari penataan transportasi di Ibu Kota. PT Jakarta Monorail saat ini menjadi pengagas proyek monorel DKI Jakarta sepanjang 30 km yang dibagi dua jalur yakni jalur hijau sepanjang 14,5 km dan jalur biru 15,5 km.

Konsorsium BUMN yang dikoordinatori PT Adhi Karya Tbk juga mengusung proposal pembangunan monorel Jakarta senilai Rp8 triliun yang akan membentang sepanjang 124,125 km dari Bekasi Timur-Cawang, Cibubur-Cawang, Cawang-Kuningan, Palmerah-Kuningan (tahap I). Proyek tahap II membentang di rute Pulo Gabung-Kelapa Gading-Harmoni-Kali Deres-Bandara Soekarno Hatta. Sedangkan tahap III mencakup Cibubur-Sentul dan Bekasi Timur-Cikarang.

Dengan masuknya Ortus Holdings sebagai investor dalam Jakarta Monorel, hal itu akan menggeser Grup

Hadji Kalla sebagai investor awal.

Menanggapi hal ini, Sukmawati mengatakan Grup Hadji Kalla masih bisa bergabung apabila pembiayaannya sudah public company. Dia juga mempersilakan Ortus Group untuk mengajak investor lain, dengan catatan sebelum dilakukan financial close.

Director Business Development of Ortus Holdings Banyu Biru Djajot mengatakan pengajuan masa konsesi itu mengacu pada investasi yang ditanamkan perusahaan senilai Rp7 triliun guna menggarap proyek angkutan penumpang berbasis rel tunggal itu.

"Grup kami sudah mengeluarkan uang sebesar US\$30 juta kepada PT Jakarta Monorel," ujarnya Selasa

Rute Monorel yang Telah Direncanakan



Profil PT Jakarta Monorail

- Panjang lintasan (km) 30 km
- Nilai proyek (US\$ Juta) 725,6
- Target minimal (Penumpang/Hari) 270.000
- Tarif (Rp/Penumpang) 9.000

Sumber: PT Jakarta Monorail, Ditah
BISNIS/RAJUTIG (K)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
3 Ruas Trans-Jawa Dikerjakan Serentak	<div>- BPJT mengungkapkan tiga proyek jalan tol Trans-Jawa yang tidak selesai pada 2014 akan dikerjakan bersamaan untuk menjaga kelayakan financial. Ketiga ruas tol itu ialah Rejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang</div> <div>- Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto A. Dardak menyatakan konstruksi ketiga jalan tol itu sesuai dengan target rampung tahun ini karena mendesak digunakan</div>			Rp. 1 triliun	PT. Trans Marga Jateng	

JALAN TOL

3 Ruas Trans-Jawa Dikerjakan Serentak

JAKARTA—BPJT mengungkapkan tiga proyek jalan tol trans-Jawa yang tidak selesai pada 2014 akan dikerjakan bersamaan untuk menjaga kelayakan finansial. Ketiga ruas tol itu ialah Rejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazaly Akman mengungkapkan ketiga badan usaha jalan tol (BUJT) pemegang lisensi ketiga ruas tol tersebut saling menunggu pelaksanaan konstruksi.

Dia menjelaskan ketiga BUJT berencana membuat kesepakatan untuk memulai konstruksi secara bersamaan untuk tetap menjaga kelayakan finansial.

"Persoalan ketiga ruas itu selain masalah tanah, juga karena masalah internal dalam BUJT-nya" ujarnya, Selasa (12/2).

Dia menuturkan ketiga ruas tol itu sudah tidak dapat selesai pada tahun 2014 dengan pertimbangan pembebasan tanah, sedikitnya membutuhkan waktu setahun. Demikian juga konstruksi yang diperkirakan berlangsung selama setahun.

Sementara itu, tiga ruas jalan

tol bisa diresmikan dan beroperasi tahun ini yaitu Ungaran-Bawen (11,9 km), jalan tol Bandara Ngurah Rai- Tanjung Benoa-Nusa Dua (11,4 km) di Bali dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2 seksi Kebon Jeruk-Ciledug (7,8 km).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto A. Dardak menyatakan konstruksi ketiga jalan tol itu sesuai dengan target rampung tahun ini karena mendesak digunakan.

Misalnya, jalan tol di Bali segera dibangun untuk menyongsong KTT APEC pada Oktober mendatang.

"Ungaran-Bawen, Ngurah Rai-Benoa-Nusa Dua bisa selesai tahun ini kemudian W2 sebagian selesai bisa sampai Ciledug lah," ucapnya usai mengikuti Public Hearing Monorail di Bahikota DKI, Selasa (12/2).

Sesuai dengan target awal, jalan tol Ungaran-Bawen selesai dalam waktu 18 bulan sejak pencanangan akhir 2011.

PT Trans Marga Jateng selaku pengelola menargetkan selesai pada 9 Agustus sesuai dengan dokumen kontrak. Dana yang digunakan untuk proyek ini menelan Rp1 triliun APBN.

Adapun jalan tol Bali diprediksi beres sebelum pelaksanaan KTT APEC sudah beroperasi. Konstruksi jalan bebas hambatan ini dari 11,4 KM sebagian besar berada di atas laut dangkal dan sekitar 2 km terletak di atas daratan sehingga menjual kelokan alam Puhu Dewata.

Hermanto menambahkan untuk jalan tol W2 dalam tahap penyelesaian. Target awal jalan lingkar ini bisa beroperasi Juli 2013. Namun untuk proyek jalan tol lainnya kemungkinan belum bisa tahun ini.

Begitu juga untuk jalan tol Kuala Namu masih dibangun dari posisi pemerintah antara Medan-Kuala Namu. Kemudian dari Kuala Namu sampai tebing tinggi masih dalam proses. "Tapi yang jelas yang ke Kuala Namu sudah mulai konstruksi."

DALAM KOTA JAKARTA

Sementara itu, berkaitan dengan proyek enam ruas tol dalam kota Jakarta sepanjang 69,77 km, Pemerintah Provinsi DKI diminta melakukan penertan modal agar mampu ikut langsung dalam pengelolaan infra-

struktur tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Slamet Nurdin mengatakan investasi langsung dimaksudkan agar pemprov nantinya bisa dilibatkan dalam pengendalian maupun penetapan tarif jalan tol.

"Kepemilikan pemprov hanya 7% dalam rencana pembangunan infrastruktur ini. Jadi tidak bisa dilibatkan dalam mengendalikan, pelayanan serta penetapan tarif tol. Apalagi PT JTD [Jakarta Toll-road Development] kan cuma anak usaha yang pembentukannya tidak melalui perda, sehingga pemprov mesti investasi langsung dalam proyek ini," ujarnya di Gedung DPRD Jakarta.

Adapun dalam rencana enam ruas jalan tol itu, Pemprov DKI menunjuk badan usaha JTD sebagai pelaksana proyek dengan estimasi anggaran mencapai Rp42 triliun yang berasal dari swasta.

Pembangunan infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan rasio jalan di Jakarta yang saat ini hanya sekitar 6,26% atau berada jauh di bawah rasio jalan kota besar di negara lain yang berkisar di angka 15%. (Amri N. Rahmat/Akhirul Anwar/Thomas Mola)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Regulasi Toll Fee Via Pipa Siap Direvisi	<ul style="list-style-type: none">Nantinya, dalam revisi aturan itu, toll fee sementara akan ditentukan sebelum dibangunnya pipa gas, setelah pipa gas terbangun, maka toll fee akan kembali didiskusikanTariff pengangkutan melalui pipa selalu dinamis. Bila ada investasi baru, penambahan biaya operasi, perubahan nilai investasi dan perubahan lainnya, maka tariff disesuaikan					

INFRASTRUKTUR GAS

Regulasi Toll Fee via Pipa Siap Direvisi

JAKARTA — Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana merevisi peraturan BPH Migas tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng mengatakan rencana revisi peraturan BPH Migas nomor 16/P/BPH Migas/VII/2008 ini dilakukan lantaran aturan belum bisa mengakomodasi seluruhnya.

"Belum tahu apa saja. Masih diinventarisir. Aturan ini direvisi karena masalah dalam transmisi itu kompleks, maka akan ada terus perubahan," kata Andi usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI tentang Kinerja BPH Migas 2012, Selasa (12/2).

Adapun salah satu aturan yang diubah adalah mengenai sistem penetapan tarif pengangkutan (*toll fee*). Direktur Gas Bumi BPH Migas Hendra Fadly mengatakan perubahan sistem penetapan *toll fee* dilakukan untuk lebih menarik investor dalam membangun pipa gas.

Nantinya, dalam revisi aturan itu, *toll fee* sementara akan ditentukan sebelum dibangunnya pipa gas. Setelah pipa gas terbangun, maka *toll fee* akan kembali didiskusikan. "Kalau dahulu, pipa dibangun dulu, baru nentuin tarifnya."

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim menambahkan, dalam revisi aturan tarif pengangkutan gas ini, pihak BPH

Migas selaku pelaksana lelang pipa open access akan menetapkan *toll fee* terlebih dahulu sebelum pipa gas terbangun.

"Karena kami yang lelang, sejak awal kami bisa melihat. Nanti, *toll fee* sementara dijadikan pertimbangan membangun," katanya. Dia mencontohkan, *toll fee* pipa gas transmisi Kepodang-Tambak Lorok milik PT Bakrie Brothers Tbk sudah ditetapkan sebelum pipa terbangun.

Menurutnya, tarif pengangkutan melalui pipa selalu dinamis. Bila ada investasi baru, penambahan biaya operasi, perubahan nilai investasi dan perubahan lainnya, maka tarif harus disesuaikan.

Sementara itu, mengenai realisasi volume pengangkutan gas bumi melalui

pipa sepanjang 2012, BPH Migas mencatat sebesar 1.539,44 BSCF.

Adapun rinciannya, PT Transportasi Gas Indonesia mengangkut sebanyak 300.640 MMscf, PT Pertamina Gas sebanyak 1.211.326,65 Mmscf, PT Perusahaan Gas Negara sebanyak 19.535,59 Mmscf, EHK sebanyak 4.000 Mmscf, dan Majuko sebanyak 3.940,64 MMscf.

Sedangkan realisasi volume niaga (penjualan) gas bumi melalui pipa dedicated hulu sepanjang 2012 adalah sebesar 281.818.145,45 MMbtu. Terdiri dari, penjualan PGN sebesar 242.308,082 MMbtu dan Badan Usaha lain sebesar 39.510,062 MMbtu. (Riendy Astria)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des																			

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Penambahan Pasokan gas di Daerah Belum Merata	<ul style="list-style-type: none">PT. PLN (Persero) pesimistis dapat menyelesaikan proyek percepatan 10.000 megawatt MW) tahap kedua (fast track program) tepat waktu karena sebagian besar pembangkit yang dibangun dalam proyek tersebut menggunakan energy baru dan terbarukanPLN usulkan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah no. 59/2007				PT. PLN	

PLN 'Nyerah' FTP-2 Tepat Waktu

JAKARTA—PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pesimistis dapat menyelesaikan proyek percepatan 10.000 megawatt (MW) tahap kedua (fast track program/FTP-2) tepat waktu karena sebagian besar pembangkit yang dibangun dalam proyek tersebut menggunakan energi baru dan terbarukan.

Lili Sunardi
redaksi@bnnis.co.id

Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang mengatakan dari total kapasitas 10.047 MW pada FTP-2, sebanyak 4.925 MW di antaranya berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan 1.753 MW berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Selain itu, akan ada juga PITU dengan total kapasitas 3.025 MW, PLTG dengan total 280 MW, serta PLTGB dengan total 64 MW.

"FTP-2 memang menarik karena hanya 37% pembangkit dalam proyek itu dimiliki oleh PLN, dan 63% sisanya dimiliki oleh IPP [independent power producer]. Selain itu, sekitar 66% pembangkit yang akan dibangun nanti adalah pembangkit dengan tenaga dari energi baru dan terbarukan," ujarnya Selasa (12/2).

Nasri mengungkapkan, diperlukan paling tidak 5 tahun untuk menyelesaikan tahapan konstruksi pembangunan PLTP. Rentan waktu tersebut masih harus ditambah dengan waktu yang diperlukan untuk mengurus izin dan melakukan tahap eksplorasi.

PLN sendiri memperkirakan akan ada 36 proyek PLTP dengan total kapasitas mencapai 2.695 MW yang sulit tercapai hingga 2016. Hal itu disebabkan karena 6 proyek PLTP berada di dalam hutan konservasi, 16 proyek terkendala persoalan teknis, dan 14 proyek lainnya belum dilelang.

"Kami hanya yakin ada 16 proyek PLTP dengan total kapasitas 2.230 MW yang akan teralisasi hingga 2016. Tapi itu tidak mempengaruhi pengajuan pembangkit yang menggunakan energi lain. Sehingga 2016 nanti kemungkinan hanya kurang 2.695

MW dari PLTP itu," jelas Nasri.

Menurutnya, izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan panas bumi lebih sulit untuk didapatkan dibandingkan dengan pembebasan lahan milik masyarakat. Selain itu, kurangnya pengalaman para kontraktor dalam membangun PLTP juga menjadi penyebab terbesar dari sulitnya merealisasikan pembangunan PLTP sesuai target yang telah ditentukan.

Izin pinjam pakai kawasan hutan memang baru bisa didapatkan setelah perusahaan mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah dan kepala dinas setempat dan memenuhi persyaratan dokumen yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan itu, Nasri juga mengusulkan agar pemerintah

Rencana Pengembangan Pembangkit berbasis Panas Bumi

Pengembang	Jumlah Proyek	Total Kapasitas (MW)
PLTP (Kemungkinan Besar Berhasil Diresalisasikan)	15	2.230
PLN dan (PLN+PGE)	3	185
Pertamina Geothermal Energy	5	430
Geodipa Energy	2	295
Chevron, SOL	3	660
Supreme Energy	3	660
PLTP Sulfat Diresalisasikan	36	2.695
Terdapat di hutan konservasi	6	360
Pemmasalahan teknis	16	1.590
Belum dilelangkan	14	825



Sumber: PLN Press

REUTERS/PTSD/REUTERS

melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 59/2007, dan segera menerbitkan pedoman penetapan harga tap panas bumi sesuai Pasal 18 dalam PP itu. Pasalnya, selama ini pem-

bahasan power purchase agreement (PPA) selalu tertunda, karena pengembang ingin mengacu pada Rèmren ESDM No. 22/2012.

Selain itu, dimasukkan juga kegiatan pemanfaatan panas bumi

PLN keluhkan izin penggunaan kawasan hutan lebih sulit untuk didapatkan.

Kontraktor dinilai belum berpengalaman membangun pembangkit berbasis panas bumi.

PLN usulkan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No. 59/2007.

sebagai kegiatan pertambangan, justru mempersulit pengembang yang ingin menggunakan panas bumi sebagai energi untuk pembangkit listrik. Apalagi, belakangan Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin menaikkan tarif pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

Dari data PLN diketahui FTP-2 akan menyasar 8 wilayah, yakni Sumatera dengan total kapasitas 3.695 MW, Kalimantan dengan total 836 MW, Sulawesi sebesar 711 MW, Maluku sebesar 51 MW, Papua sebesar 116 MW, Nusa Tenggara Barat sebesar 33 MW, Nusa Tenggara Timur sebesar 116 MW, dan Jawa sebesar 4.497 MW. ■

Tarif Listrik Berbasis PLTSa Rp1.450/kWh

JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan feed in tariff pembangkit listrik berbasis surya (PLTSa) zero waste sebesar Rp1.450 per kilowatt hour (kWh), dan Rp1.250 per kWh untuk PLTSa yang menghasilkan limbah.

Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Muljana mengatakan kebijakan feed in tariff ini dikeluarkan untuk menarik investor dalam pembangunan PLTSa di dalam negeri.

"Untuk PLTSa zero waste itu sekitar Rp1.450 dan yang menghasilkan limbah Rp1.250, tapi itu belum final dan kami masih terus mengkajinya," katanya di Jakarta, Selasa (12/2).

Rida mengungkapkan PLTSa merupakan alternatif untuk kota-kota besar dengan kebutuhan listrik yang juga besar. Selain itu, PLTSa juga bermanfaat dalam membersihkan sampah yang selama ini menjadi masalah pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Rida juga menegaskan perlunya keseriusan regulasi mengenai sampah dan limbah untuk pengembangan PLTSa. Dengan demikian, investor tidak lagi ragu saat ingin menanamkan modalnya di sektor energi terbarukan itu.

Sementara itu, Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang mengatakan PLN siap membeli listrik dari pembangkit listrik berbasis biomassa. Apalagi saat ini pemerintah juga terus me-

ngeluarkan kebijakan feed in tariff untuk pembangkit berbasis biomassa.

"Pemerintah sudah menetapkan feed in tariff biomassa, jadi silakan saja kalau ada pengembang yang ingin membangun pembangkit berbasis biomassa dengan. Tarifnya juga akan sudah ditentukan, jadi tidak bisa ditawar," ungkapnya.

Hanya saja, Nasri mengingatkan agar para pengembang memperhatikan kepastian bahan baku untuk pembangkit berbasis biomassa. Dia memonitonkan cakupan sawit yang ternyata lebih laku dengan harga yang lebih tinggi di luar negeri, sehingga menjadikan pasokan cakupan sawit untuk pembangkit menjadi sulit.

Pembangkit listrik tenaga biomassa di Belitung bahkan saat ini mengalami kesulitan operasional karena kurangnya pasokan cakupan sawit. "PLN membuka kesempatan yang seluasnya untuk pengembangan biomassa, karena dapat mengurangi subsidi dari pengurangan pemakaian BBM [bahan bakar minyak] untuk pembangkit," tuturnya.

PLN sendiri empat menolak pengembangan pembangkit listrik dengan bahan bakar gambut di Kalimantan Barat, karena alasan lingkungan. Akan tetapi, PLN mengusulkan pengembangan cakupan sawit untuk bahan bakar pembangkit, karena melimpahnya pasokan kepala sawit di daerah tersebut. (Lili Sunardi)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Bendungan Lau Simeme Masuk MP3EI	<div><div>- Kepala Bappeda Sumut Riadil A. Lubis mengatakan dengan masuknya proyek bendungan yang akan dibangun di lahan seluas 200 hektare di Kabupaten Deli Serdang tersebut dalam proyek MP3EI, maka proses pembangunannya akan dipercepat karena menjadi prioritas</div><div>- Sebelumnya dikabarkan bahwa proses pembangunan bendungan masih terkendala Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/2005 karena masih dikategorikan sebagai kawasan hutan</div></div>			Rp. 3 Triliun		

PROYEK DI SUMUT

Bendungan Lau Simeme
Masuk MP3EI

MEDAN—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara memasukkan rencana pembangunan Bendungan Serba Guna Lau Simeme sebagai salah satu proyek baru dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diusulkan kepada pemerintah pusat.

Kepala Bappeda Sumut Riadil A. Lubis mengatakan dengan masuknya proyek bendungan yang akan dibangun di lahan seluas 200 hektare di Kabupaten Deli Serdang tersebut dalam proyek MP3EI, maka proses pembangunannya akan dipercepat karena menjadi prioritas.

Pasalnya, dengan terbangunnya bendungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bersih hingga 3.000 liter per detik serta menghasilkan energi listrik sekitar 3 MW melalui pembangkit tenaga listrik. Di samping itu juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi persawahan serta mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan.

"Lau Simeme ini sudah kami usulkan kepada pemerintah pusat agar masuk dalam proyek baru dalam MP3EI karena memiliki nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan air sekaligus mengatasi banjir

sehingga perlu dipercepat," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (12/2).

Investasi yang dibutuhkan untuk proses pembangunan sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan proses pembebasan lahan diperlukan dana Rp200 miliar yang berasal dari pemerintah daerah.

"Investasinya sudah diajukan untuk mendapatkan loan atau dana dari APBN," tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan bahwa proses pembangunan bendungan masih terkendala Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/2005 karena masih dikategorikan sebagai kawasan hutan sehingga Pemkab Deli Serdang belum dapat menerbitkan izin lokasi.

Padahal studi untuk pembangunan bendungan serba guna tersebut telah dilakukan sejak tahun 2006 dan desainnya sudah disiapkan Balai Wilayah Sungai 2. Selain itu, proses pembebasan lahan juga tidak sulit dilakukan karena sangat sedikit pemukiman warga yang berada di areal pembangunan bendungan tersebut.

Meski demikian usulan revisi SK Menteri tersebut akan selesai sehingga pembangunan bendungan itu dapat segera dilakukan. *(Dewi Andriani)*



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Interkoneksi Listrik Jawa-Sumatera Beres 2017	<div>- Dalam proyek pembangunan interkoneksi Jawa-Sumatera tersebut menggunakan sistem transmisi kelistrikan yang disebut teknologi tegangan tinggi arus searah (high voltage direct current/HVDC) dengan memanfaatkan kabel bawah laut</div> <div>- Saat ini PLN telah selesai proses klasifikasi untuk penentuan perusahaan yang akan mengoperatori proyek yang bertujuan untuk meningkatkan elektrifikasi tersebut</div>	2013	2017	Rp. 20 triliun	PT. PLN	

Interkoneksi Listrik Jawa-Sumatera Beres 2017

JAKARTA-PT PLN (Persero) menargetkan pembangunan proyek interkoneksi listrik Jawa-Sumatera bisa dimulai pada triwulan pertama 2013 dan diharapkan rampung pada 2017 mendatang. Sehingga sistem kelistrikan Jawa-Bali, dan Sumatera yang sekarang masih terpisah, bakal saling terhubung dalam satu jaringan interkoneksi.

Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang mengatakan, dalam proyek pembangunan interkoneksi Jawa-Sumatera tersebut menggunakan sistem transmisi kelistrikan yang disebut teknologi tegangan tinggi arus searah (*high voltage direct current*/HVDC), dengan memanfaatkan kabel bawah laut.

Saat ini PLN telah selesai proses klasifikasi untuk penentuan perusahaan yang akan mengoperatori proyek yang bertujuan meningkatkan elektrifikasi tersebut. Awalnya, PLN menargetkan pembangunan konstruksi selama 46 bulan dan rampung pada Februari 2016.

Proyek transmisi senamiana

lebih 700 kilometer ini meliputi pekerjaan stasiun konverter/inverter di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Dari target Februari 2016, jadi geser Februari 2017 karena ada proses *loan* untuk penunji anggaran," kata Nasri di Jakarta kemarin.

PLN menargetkan, ada listrik sebesar 3.000 MW yang tersalur dari sejumlah pembangkit listrik dari Jawa-Bali ke Sumatera atau sebaliknya untuk saling memasok listrik. Nilai investasi pembangunan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera-Jawa ini diperkirakan Rp 20 triliun. Sumber pendanaannya sebagian besar berasal dari *loan* JICA (Japan International Cooperation Agency) dan dana pendamping dari anggaran PLN.

Proyek interkoneksi Sumatera-Jawa ini terdiri atas stasiun pengubah listrik AC menjadi DC (stasiun konverter) di Muara Enim dan listrik DC akan diubah kembali menjadi listrik AC (stasiun inverter) di Bogor. (lum).



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Hari Ini, Monorel Diuji Publik	<div><div>- PT. Jakarta Monorel akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lau. Rute yang diajukan yakni green line dengan jalur Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Tanah Abang-Roxy-Mal Taman Anggrek</div><div>- Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menginginkan PT. Adhi Karya dengan PT Jakarta Monorel bersaing dalam membangun moda transportasi monorel. Keduanya akan membangun monorel di lokasi yang berbeda</div></div>					

Hari Ini, Monorel Diuji Publik

GEBRAKAN Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Dahlan Iskan dengan membentuk konsorsium pembangunan monorel menggugah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk bergerak. Orang nomor satu di Ibukota ini pun, berencana menggelar uji publik terkait keberlanjutan proyek transportasi massal berbasis rel itu.

Perusahaan pengusung monorel, yakni PT Jakarta Monorail yang merupakan konsorsium lama penggerak monorel akan dihadirkan dalam uji publik tersebut. "Besok uji publik, tanya langsung besok.

Masalah kerangan tanya, partnernya siapa tanya saja, terbuka kok semua," ujar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, di Balai Kota Jakarta, kemarin (11/2).

Jokowi mengungkapkan, PT Jakarta Monorail akan memaparkan semua aspek proyek Monorel yang akan dibangun oleh mereka. "Yang mau datang PT Jakarta Monorail. Mereka akan memaparkan rute, biaya, minta subsidi atau engga, dimulai proyeknya kapan, pembiayaannya mereka darimana. Semuanya akan dibahas besok," kata Jokowi ■

► Baca *Hari...* Hal 15

Sambungan dari halaman 9

PT Jakarta Monorel akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan yakni green line dengan jalur Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi, serta blue line jalurnya Kampung Melayu-Casablanca-Karet-Tanah Abang-Roxy-Mal Taman Anggrek. Awalnya, Jokowi meminta antara PT Jakarta Monorail dengan PT Adhi Karya untuk membentuk sebuah konsorsium perusahaan penggerak proyek monorel.

Namun PT Adhi Karya mundur dengan sejumlah sebab. PT Adhi Karya yang merupakan konsorsium yang terdiri dari perusahaan BUMN, yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Lembaga Elektronika Negara (LEN), PT Telkom Tbk, PT Industri Kereta Api (Inka), dan Bank Mandiri, kemudian memilih mengajukan proposal sendiri

untuk konsep monorel di Jakarta. PT Adhi Karya memilih rute lain tidak seperti yang diajukan PT Jakarta Monorail.

Jalur yang diusulkan oleh PT Adhi Karya adalah Bekasi Timur-Cawang (94.600 penumpang per hari), Cibubur-Cawang (53.600 penumpang per hari), dan Cawang-Kuningan (42.700 penumpang per hari).

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menginginkan PT Adhi Karya (Persero) dengan PT Jakarta Monorail bersaing dalam membangun moda transportasi massal monorel. Keduanya akan membangun monorel di lokasi yang berbeda. Dahlan mengungkapkan, Adhi Karya akan membangun monorel di wilayah Bekasi Timur-Cawang-Kuningan-Cibubur. Sedangkan, Jakarta Monorel membangun Pal Merah-Kuningan. "Nanti bisa lihat prestasinya. Lebih cepat yang mana, Adhi Karya dengan Jakarta Monorel dalam bangun monorel," tandasnya. (wok)